

**KONSEP KURIKULUM REKONSTRUKSI SOSIAL
DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM MUATAN LOKAL**

MAKALAH

Oleh :

Nandi Warnandi

NIM. 019573

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN KURIKULUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “KONSEP KURIKULUM REKONSTRUKSI SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM MUATAN LOKAL”. Penulis merasa sangat tertarik untuk membahas topik ini sehubungan dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi di negara kita saat ini, serta adanya kebijakan Pemerintah tentang dimasukkannya Program Pengembangan Muatan Lokal dalam kurikulum pendidikan formal di Indonesia.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak sekali menghadapi hambatan yang dirasakan, terutama karena keterbatasan yang saat ini dimiliki oleh penulis. Namun karena dorongan dari berbagai pihak, serta bimbingan dari dosen, alhamdulillah makalah ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari rekan-rekan pada umumnya, guna penyempurnaan di masa mendatang, insya Allah penulis akan menerima saran dan kritik dengan hati terbuka.

Akhirnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan makalah ini, mudah-mudahan makalah ini ada guna dan manfaatnya. Amin.

Bandung,
Wassalam Penulis.

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan	3
D. Sistematika	4
BAB II KONSEP KURIKULUM REKONSTRUKSI SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL.....	5
A. Konsep Kurikulum Rekonstruksi Sosisl	5
B. Konsep Kurikulum Muatan Lokal	8
C. Tujuan Kurikulum Muatan Lokal	11
D. Kurikulum Muatan Lokal Sebagai Alternatif Pengembangan Relevansi Pendidikan	12
E. Penerapan Konsep Rekonstruksi Sosial Dalam Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Di Indonesia	14
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran	19
DAFTAR BACAAN	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni akan mendorong kebutuhan dan kondisi baru dan tentunya dapat menimbulkan berbagai macam tantangan dan permasalahan yang semakin rumit dan kompleks. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan manusia berkualitas, yaitu “manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani” (GBHN : 1993).

Manusia berkualitas seperti yang diharapkan di atas, hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang komprehensif, terpadu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya. Dalam hal ini perlu ada perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan itu. Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar mengajar harus mengacu pada problema-problema yang dihadapi masyarakat dan lingkungan kebutuhan peserta didik.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan segala aspek kehidupan manusia, yang menyangkut setiap individu. Hal ini dikarenakan pendidikan berperan dan berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan manusia dengan seluruh aspek kepribadiannya. Dengan kata lain pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya.

Apa yang penulis kemukakan di atas, rasanya tidak mungkin dapat direalisasikan sekaligus, tetapi memerlukan tahapan secara berangsur-angsur, sistematis dan berencana. Hal tersebut idealnya harus dimulai seini mungkin pada usia pra sekolah, kemudian diintensifkan secara formal melalui pendidikan formal pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Menghadapi berbagai isu dan tantangan tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat GBHN 1993, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan empat strategi pembangunan pendidikan nasional, (1) Pemerataan kesempatan pendidikan, (2) Relevansi pendidikan,

(3) Kualitas pendidikan, dan (4) Efisiensi pengelolaan pendidikan (Depdikbud : 1994; 97-98). Untuk meningkatkan relevansi pendidikan, pemerintah mengambil kebijakan “link and match” yang dioperasionalkan melalui kurikulum muatan lokal.

Peningkatan relevansi pendidikan, merupakan salah satu dari empat strategi pokok pembangunan nasional. Pemerintah telah berusaha diantaranya meningkatkan relevansi pendidikan, yaitu melalui pengembangan kurikulum muatan lokal, namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu pengembangan kurikulum muatan lokal masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan lagi, diantaranya menyempurnakan kurikulumnya, tujuannya, menambah fasilitasnya dan sumber belajar serta meningkatkan kemampuan gurunya.

Pada kurikulum 1994, kurikulum muatan lokal mulai diterapkan secara resmi, atau menggunakan pendekatan monolitik yang berbentuk bidang studi tersendiri. Pengembangan kurikulum muatan lokal dimaksudkan untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan pengembangan kurikulum sentralisasi, dan bertujuan agar peserta didik mencintai serta mengenal lingkungannya.

Konsep rekonstruksi sosial sangat besar peranannya dalam menghadapi kenyataan hidup di masyarakat. Di dalamnya termasuk bagaimana cara memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat, menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Implikasi rekonstruksi sosial dalam konsep kurikulum merupakan persoalan yang meluas dan mendalam, sehingga tidak pernah tuntas dibicarakan orang. Oleh karena itu dalam makalah ini penulis akan mencoba membahas persoalan mengenai bagaimanakah implikasi paham rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.

Rekonstruksi sosial memandang bahwa pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerja sama. Kerja sama atau intraksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi antara siswa dengan siswa, dengan orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui kerja sama dan interaksi inilah diharapkan siswa berusaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, baik masalah pribadi maupun sosial, sehingga nantinya diharapkan dapat menciptakan masyarakat baru yang lebih stabil.

B. Permasalahan

Dalam pembahasan makalah ini akan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep dasar kurikulum rekonstruksi sosial, konsep dasar pengembangan kurikulum muatan lokal dan implikasi konsep kurikulum rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum muatan lokal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah : “ Bagaimanakah implikasi rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum muatan lokal di Indonesia.

Masalah tersebut akan penulis coba mencari pemecahannya dengan mengkaji dari berbagai sumber, pembahasannya akan diuraikan pada bagian berikut dari makalah ini.

C. Tujuan

Secara umum penulisan makalah ini ditujukan untuk menganalisis, menemukan karakteristik dan implikasi kurikulum rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Sedangkan tujuan secara khususnya adalah sebagai berikut :

1. Ingin memperoleh gambaran umum mengenai konsep kurikulum rekonstruksi sosial.
2. Ingin memperoleh gambaran mengenai konsep dasar kurikulum muatan lokal.
3. Ingin memperoleh gambaran bagaimana implikasi kurikulum rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum muatan lokal di Indonesia.
4. Untuk melengkapi salah satu tugas pada mata kuliah Landasan dan Prinsip Pengembangan Kurikulum yang dibina oleh Bapak Prof. Dr. H. Nana Syaodih Sukmadinata.

D. Sistematika

Untuk lebih memudahkan bagi penulis dalam menguraikan setiap permasalahan, dan memberikan panduan kepada para pembaca makalah ini, pertama-

tama penulis membagi makalah ini menjadi tiga bab, sedangkan sistematika secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, di dalamnya dikemukakan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan sistematika itu sendiri.

Bab kedua memfokuskan pembahasan mengenai “Implikasi kurikulum rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum muatan lokal di Indonesia”. Di dalamnya dibahas tentang; konsep kurikulum rekonstruksi sosial, konsep dasar pengembangan kurikulum muatan lokal, tujuan kurikulum muatan lokal , kurikulum muatan lokal sebagai alternatif pengembangan relevansi pendidikan dan penerapan konsep rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum muatan lokal di Indonesia.

Sedangkan pada bab ketiga yang merupakan bab terakhir dari makalah ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran.

Itulah sistematika pada penulisan makalah “Konsep kurikulum rekonstruksi sosial dalam pengembangan program muatan lokal”

BAB II

KONSEP KURIKULUM REKONSTRUKSI SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

A. Konsep Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Hilda Taba menyatakan bahwa John Dewey memandang bahwa fungsi sekolah sebagai psikologis dan sosial. Berdasarkan pendapat di atas para Reconstructionism mengikuti langkah-langkah yang mengarahkan mereka pada tujuan penggunaan sekolah untuk mencapai perkembangan di masyarakat. Sedangkan George S. dalam bukunya “Dare The School Build a New Socil Order” (Dalam Oliva) mengemukakan pendapatnya bahwa “Recontructionism seharusnya bukanlah penghubung warisan budaya yang sederhana atau masalah-masalah studi yang sederhana tetapi yang seharusnya menjadi agen untuk menyelesaikan masalah-masalah politik dan sosial yang meliputi masalah-masalah yang tidak terpecahkan dan kontroversial”.

Pada zaman dahulu, waktu manusia masih hidup dalam rombongan-rombongan masyarakat kecil, terpencil dan sederhana, pendidikan untuk anak-anak dalam masyarakat diselenggarakan di luar sekolah, tanpa sekolah. Segala sesuatu yang perlu bagi pendidikannya, diperoleh anak-anak dari orang-orang di lingkungannya tanpa pendidikan formal di sekolah. Anak-anak banyak meniru perbuatan orang dewasa, sehingga anak-anak pandai mengolah tanah, berburu dan lain sebagainya. Dengan jalan demikian mereka dapat mengurus diri sendiri dan mencari nafkah dalam masyarakat itu. Akan tetapi pendidikan itu tidak serasi lagi apabila terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat, yang menuntut syarat-syarat yang lebih tinggi dan lebih berat dari tiap-tiap warganegara. Makin maju masyarakat makin banyak yang harus diperoleh anak-anak, makin banyak mata pelajaran yang harus dikuasai oleh anak-anak dan karena itu bertambah lamalah mereka harus bersekolah.

Pandangan rekonstruksi sosial dalam kurikulum sekolah sudah dimulai kira-kira tahun 1920. Dimulai oleh seorang tokoh rekonstruksi sosial Harold Rug, dimana ia melihat terdapat kesenjangan antara kurikulum dengan msyarakat. Ia menginginkan para siswa dengan pengetahuan dan konsep-konsep baru

yang diperolehnya dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial. Setelah diharapkan dapat menciptakan masyarakat baru yang lebih stabil.

Kurikulum rekonstruksi sosial tentunya berbeda atau memiliki perbedaan dengan kurikulum-kurikulum yang lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata (2000 : 91) ia mengemukakan bahwa; “Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat”. Menurut pandangan ahli-ahli rekonstruksi sosial bahwa pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerja sama. Dalam kerja sama atau dalam interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerja sama ini siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.

Theodore Brameld, pada awal tahun 1950-an menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Dalam masyarakat demokratis, seluruh warga harus turut serta dalam perkembangan dan pembaharuan masyarakat. Untuk melaksanakan hal ini sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membangun individu memperkembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial.

Para rekonstruksionis sosial tidak mau terlalu menekankan kebebasan individu. Mereka ingin meyakinkan murid-murid bagaimana masyarakat membuat warganya seperti yang ada sekarang dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi warganya melalui konsensus sosial. Brameld juga ingin memberikan keyakinan tentang pentingnya perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut harus dicapai melalui prosedur demokrasi. Para rekonstruksinis sosial menentang intimidasi, menakut-nakuti dan kompromi semu. Mereka mendorong agar para siswa mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak (crucial) dan kerja sama atau bergotong royong untuk memecahkannya.

Ada beberapa ciri yang khusus dimiliki dalam desain kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu sebagai berikut :

1. Asumsi : Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Tantangan-tantangan tersebut merupakan bidang garapan studi

sosial, yang perlu didekati dari bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, bahkan pengetahuan alam, dan matematika. Masalah-masalah masyarakat bersifat universal dan hal ini dapat dikaji dalam kurikulum.

2. Masalah-masalah sosial yang mendesak : Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam pertanyaan, seperti: Dapatkah kehidupan seperti ekarang ini memberikan kekuatan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang akan mengganggu integritas kemanusiaan ? Dapatkah tata ekonomi dan politik yang ada dibangun kembali agar setiap orang dapat memanfaatkan sumber-sumber daya alam dan sumber daya manusia seadil mungkin. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengundang pengungkapan lebih mendalam, bukan saja dari buku-buku dan kegiatan laboratorium tetapi juga dari kehidupan nyata dalam masyarakat.
3. Pola-pola organisasi : Pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Di tengah-tengahnya sebagai poros dipilih suatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Dari tema utama dijabarkan sejumlah topik yang dibahas dalam diskusi-diskusi kelompok, latihan-latihan, kunjungan dan lain-lain. Topik-topik dengan berbagai kegiatan kelompok ini merupakan jari-jari. Semua kegiatan jari-jari tersebut dirangkum menjadi satu kesatuan sebagai bingkai.

B. Konsep Dasar Kurikulum Muatan Lokal

Kurikulum memiliki pengertian yang beragam, dalam arti sempit kurikulum selalu dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran atau garis-garis besar program pengajaran yang akan dilaksanakan, sedangkan dalam arti yang lebih luas kurikulum mencakup semua pengalaman anak di bawah bimbingan sekolah.

Salah satu definisi kurikulum yang mengandung makna lebih luas dikemukakan oleh Doll (1976 : 6) sebagai berikut :

“The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding, develop skills, and alter attitudes, appreciations, and values under the auspices of that school”.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Finch dan Crunkilton (1979 : 7) yang mengartikan kurikulum sebagai : “... the sum of the learning activities and experiences

that a student has under the auspices or direction of the school". Atas dasar dua pendapat di atas, kurikulum bukan hanya diartikan sebagai mata pelajaran atau isi dan proses saja, tetapi mencakup semua pengalaman atau kegiatan belajar-mengajar siswa dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan.

Ditinjau dari pengertian kurikulum, sebenarnya ada empat komponen pokok yang tercakup di dalamnya, yaitu tujuan, konten, aktivitas belajar dan evaluasi. Zais (1976 : 16) menegaskan tentang komponen kurikulum ini sebagai berikut : "...the components or elements included in a curriculum are (a) aims, goals, and objectives, (b) subject matter or content, (c) learning activities, and (d) evaluation". Sejalan dengan pendapat Zais di atas, Nana Syaodih (1989 : 110) mengidentifikasi empat komponen kurikulum dengan (a) tujuan, (b) isi atau materi, (c) proses atau sistim penyampaian dan (d) evaluasi.

Keempat komponen kurikulum seperti dikemukakan di atas pada dasarnya bersumber dari konsep kurikulum yang dikembangkan oleh Tyler. Dalam hal ini Tyler (1949 : 1) mengemukakan empat pertanyaan pokok tentang kurikulum, yaitu seperti berikut :

1. What educational purposes should the school seek to attain ?
2. What educational experiences can be provide that are likely to attain these purposes ?
3. How can these educational experinces be effectively organized ?
4. How can we determine whether these purpose are being attained ?

Konsep kurikulum yang dikembangkan oleh Tyler ini pula yang selanjutnya banyak dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan masalah kurikulum.

Menurut pandangan modern, kurikulum bukan hanya sekedar rencana pelajaran. Kurikulum bertitik tolak dari sesuatu yang bersifat aktual yang terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Semua pengalaman belajar yang diperoleh dari sekolah seperti mempelajari berbagai mata pelajaran, melakukan berbagai kegiatan, interaksi sosial di lingkungan sekolah, kerja sama kelompok dan pengalaman kehidupan lainnya tercakup dalam pengertian kurikulum. Atas dasar pandangan tersebut, sekolah dapat dipandang sebagai miniatur masyarakat, karena situasi dalam lingkungan sekolah, nilai-nilai, adat istiadat, sermuanya dapat dipelajari di sekolah melalui kurikulum sekolah. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam surat keputusannya No. 060/U/1993, telah ditetapkan kurikulum baru, yang mulai

diberlakukan mulai tahun pelajaran 1994/1995 secara bertahap. Kurikulum pendidikan dasar tersebut berisi tentang dua muatan kurikulum yaitu; muatan kurikulum yang berlaku secara nasional dan muatan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan daerah. Muatan kurikulum, yang kedua ini disebut “Kurikulum Muatan Lokal”.

Kurikulum muatan lokal adalah salah satu bagian dari kurikulum yang berlaku saat ini, istilah muatan lokal dalam dunia pendidikan di Indonesia secara resmi mulai tahun 1987, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan /kebudayaan Nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987, tentang muatan lokal. Kurikulum atau mata pelajaran muatan lokal pada awalnya bukan mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan materi pelajaran lokal yang dimasukkan ke dalam berbagai bidang studi yang relevan. Ibrahim (1990), mengemukakan bahwa “muatan lokal adalah program pendidikan yang isinya dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta perkembangan daerah”.

Sejak diberlakukannya kurikulum tahun 1994, muatan lokal menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, atau tidak lagi diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya. Konsep muatan lokal tidak tidak lagi sama seperti tahun 1987, konsep muatan lokal di sini maksudnya adalah “Bentuk penyelenggaraan pendidikan yang bersifat desentralisasi, sebagai upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan relevansi terhadap kebutuhan daerah yang bersangkutan” (Suharsimi Arikunto : 1998). Sedangkan pendapat lainnya mengemukakan bahwa “Kurikulum muatan lokal menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, berdasarkan pendekatan monolitik” (Usman Wahyudi dan Yatim Riyani : 1995). Pendekatan monolitik bertitik tolak dari pandangan bahwa setiap mata pelajaran mempunyai otonomi masing-masing, membawa misi tertentu dalam suatu kesatuan sistem. Jadi pada kurikulum tahun 1994 muatan lokal sudah menjadi bidang studi yang berdiri sendiri, baik bidang studi wajib maupun bidang studi pilihan, atau lebih dikenal dengan mata pelajaran muatan lokal wajib dan mata pelajaran muatan lokal pilihan.

C. Tujuan Kurikulum Muatan Lokal

Tujuan merupakan bagian penting yang harus ditetapkan terlebih dahulu dalam setiap kegiatan. Dengan tujuan yang jelas maka aktivitas yang dilakukan juga akan memiliki sasaran yang jelas pula. Demikian juga dengan kurikulum muatan lokal,

tujuan merupakan komponen yang pertama sekali harus dirumuskan. Nana Syaodih (1989 : 111) menyatakan; tujuan kurikulum diangkat dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta didasari oleh falsafah negara. Karena itu tujuan memegang peran penting yang akan mewarnai keseluruhan komponen-komponen lain, sekaligus mengarahkan semua kegiatan pengajaran yang dilakukan.

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal dimaksudkan terutama untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan pengembangan kurikulum sentralisasi, dan bertujuan agar peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya, serta mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional, maupun pembangunan lokal, sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya lingkungannya. Sedangkan tujuan yang lebih spesifik dari kurikulum muatan lokal adalah :

1. Mengelola lingkungan alam secara bertanggung jawab, melestarikan nilai-nilai dan mengembangkan kebudayaan daerah serta meningkatkan mutu pendidikan dan jati diri manusia Indonesia dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap senang bekerja, bergaul, serta ketertiban dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan sebagai pribadi anggota masyarakat dan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab (Depdikbud : 1994).

Suharsimi Arikunto (1998), mengemukakan tujuan pengajaran muatan lokal secara lebih rinci lagi, yaitu sebagai berikut :

1. Lebih mengenal kondisi alam lingkungan sosial dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya.
2. Dapat menerapkan kemampuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya.
3. Memiliki keterampilan khusus sehingga dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Dapat memanfaatkan sumber belajar di dfaerah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Memiliki sikap dan prilaku yang selaras dengan nilai-nilai aturan yang berlaku di daerahnya serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Melalui tujuan-tujuan di atas diharapkan dapat membentuk prilaku siswa, agar mereka memiliki wawasan yang luas dan mantap tentang keadaan lingkungan dan kebudayaan masyarakat. Sehingga nantinya siswa mampu mengembangkan serta melestarikan sumber daya alam.

D. Kurikulum Muatan Lokal Sebagai Alternatif Pengembangan Relevansi Pendidikan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki aneka ragam adat istiadat, kesenian, tatacara, tatakrama, pergaulan, bahasa, dan pola kehidupan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan ciri khas yang memperindah dan memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, agar tidak kehilangan ciri khasnya. Upaya tersebut harus dimulai sedini mungkin, yaitu melalui pendidikan formal di sekolah. Pengenalan keadaan lingkungan alam, sosial, dan budaya kepada peserta didik di sekolah memberikan kemungkinan kepada mereka untuk akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya.

Selain itu untuk menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan tujuan pendidikan nasional, perlu diupayakan penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum yang jelas dan terarah sehingga potensi alam dan budaya daerah dapat dijadikan modal utama pembangunan bangsa dalam mencapai kesejahteraan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Keterkaitan pendidikan terutama dengan lingkungan dan pembangunan daerah telah diatur melalui undang-undang sistem pendidikan nasional (UUSPN) No. 2 Tahun 1989 pasal 38 ayat 1, yang berbunyi “Pelaksanaan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan”.

Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang terdiri dari beberapa rumpun pelajaran yang berfungsi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Ada tiga rumpun dalam mata pelajaran muatan lokal, yaitu: Rumpun budaya, Rumpun keterampilan dan rumpun pendidikan lingkungan

(Suharsismi Arikunto : 1988). Dari masing-masing rumpun dapat dijabarkan ke dalam materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Pembagian dari masing-masing rumpun adalah sebagai berikut :

(1). Rumpun budaya terdiri dari ; kesenian, adat istiadat, tatakrama (etika) dan tatacara, teknologi (termasuk pembuatan obat-obatan tradsisional), budi pekerti, dan bahasa daerah. (2) Rumpun keterampilan terdiri dari kerumahtanggaan termasuk PKK, keteknologian, peralatan rumah tangga, pertamanan, pertanian, peternakan dan kelautan. (3) Rumpun pendidikan lingkungan terdiri dari lingkungan fisik (keberihan, kerapihan, kenyamanan, keindahan), lingkungan sosial (Kamanan, kesehatan, keselamatan, pekerjaan), lingkungan budaya (bangunan, gedung, benda-benda kuno, tata kota, norma dan aturan).

E. Penerapan Konsep Rekonstruksi Sosial Dalam Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di Indonesia

Perubahan dalam masyarakat, terutama akhir-akhir ini sangatlah cepat, sehingga sekolah sering tidak sanggup mengikuti jejak kemajuan masyarakat. Akibatnya; sekolah bertambah lama dan bertambah jauh ketinggalan dan dicap konservatif, tradisional. Sekolah tidak dapat bergerak secepat masyarakat, dan sering sekolah berpegang teguh pada mata pelajaran yang dahulu memang fungsional, akan tetapi dalam masa modern ini sudah tidak lagi memenuhi tuntutan zaman. Timbullah kekecewaan bahwa sekolah itu kolot, mengasingkan diri dari masyarakat dan karena itu tidak mampu dan serasi lagi untuk mempersiapkan anak-anak bagi kehidupan mereka dalam dunia modern ini. Akibatnya timbul dan mengharuskan sekolah untuk meninjau kurikulumnya agar lebih relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan akan berjalan baik, jika kita memahami masyarakat dimana pendidikan itu dilaksanakan. Karena itu setiap pembinaan kurikulum harus senantiasa mempelajari keadaan, perkembangan, kegiatan, dan aspirasi masyarakat.

Salah satu ciri masyarakat ialah perubahannya yang cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam teknologi, yang sering tidak dapat kita ramalkan akibatnya. Perubahan-perubahan yang hebat dan cepat dalam masyarakat, akan memberikan tugas yang lebih luas dan lebih berat kepada sekolah. Sekolah yang tradisional, yang hanya menoleh kebelakang pasti tidak dapat

memberikan pendidikan yang relevan. S. Nasution (2001 : 154), mengemukakan bahwa “Perubahan masyarakat mengharuskan kurikulum senantiasa ditinjau kembali, kurikulum yang baik pada suatu saat, sudah tidak lagi sesuai dalam keadaan yang berubah”.

Masyarakat senantiasa berubah dan terus menerus akan berubah, masyarakat Indonesia sekarang ini jauh berbeda dengan masyarakat jaman nenek moyang kita. Perubahan yang terjadi di masyarakat diantaranya dipengaruhi oleh faktor ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Perubahan dalam bidang pendidikan telah terjadi secara drastis pada akhir abad kedupuluh. Dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, tidak ada yang lebih mendasar dibandingkan dengan perubahan yang terjadi dalam kurikulum (Kelly : 1977). Sifatnya yang sangat mendasar ditunjukkan oleh fakta bahwa kurikulum merupakan landasan utama dari setiap sistem pendidikan. Perubahan dalam kurikulum telah berpengaruh secara langsung terhadap pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dan sumber-sumber pembelajaran.

Bila kita menganalisa keberadaan masyarakat Indonesia dewasa ini yang sedang mengalami krisis di berbagai bidang, maka salah satu cara penyembuhannya yaitu melalui perbaikan atau perubahan kurikulum, yaitu dari kurikulum sentralisasi menjadi kurikulum desentralisasi. Dalam pelaksanaan kurikulum desentralisasi atau lebih dikenal dengan muatan lokal, penulis berpendapat rasanya sangat tepat kalau saat ini di Indonesia menerapkan kurikulum rekonstruksi sosial, khususnya dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal. Kurikulum rekonstruksi sosial mempersiapkan peserta didik untuk merubah kondisi lingkungan masyarakat yang lebih baik dan lebih maju lagi.

Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki bentuk yang berbeda dengan bentuk kurikulum lainnya, hal ini dikemukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata (2000 : 93-94). Yaitu sebagai berikut :

- a. Tujuan dan isi kurikulum; Tujuan program pendidikan setiap tahun berubah. Dalam program pendidikan ekonomi-politik, umpamanya untuk pertama tujuannya membangun kembali dunia ekonomi politik. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah (1) mengadakan survai secara kritis terhadap masyarakat, (2) mengadakan studi tentang hubungan antara keadaan ekonomi lokal dan ekonomi nasional serta dunia, (3) mengadakan studi tentang latar

belakang historis dan kecenderungan-kecenderungan perkembangan ekonomi, hubungannya dengan ekonomi lokal, (4) mengkaji praktik politik dalam hubungannya dengan faktor ekonomi, (5) menetapkan rencana perubahan praktik politik, (6) mengevaluasi semua rencana dengan kriteria, apakah telah memenuhi kepentingan sebagian besar orang.

- b. Metode; Dalam pengajaran rekonstruksi sosial para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Guru-guru berusaha membantu para siswa menemukan minat dan kebutuhannya sesuai dengan minat masing-masing siswa, baik dalam kegiatan pleno maupun kelompok-kelompok berusaha memecahkan masalah sosial yang dihadapnya. Kerja sama baik antara individu dalam kegiatan kelompok, maupun antar kelompok dalam kegiatan pleno sangat mewarnai metode rekonstruksi sosial, belajar merupakan kegiatan bersama, ada kebergantungan antara seorang dengan yang lainnya. Dalam kegiatan belajar tidak ada kompetisi yang ada adalah kooperasi atau kerja sama saling pengertian dan konsensus. Anak-anak sejak sekolah dasar diharuskan turut serta dalam survei kemasyarakatan serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Untuk kelas tinggi selain mereka dihadapkan kepada situasi nyata juga mereka diperkenalkan dengan situasi-situasi ideal. Dengan hal itu diharapkan para siswa dapat menciptakan model-model kasar dari situasi yang akan datang.
- c. Evaluasi; Dalam kegiatan evaluasi para siswa juga dilibatkan. Keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal yang akan diujikan dinilai lebih dulu baik ketepatan maupun keluasan isinya, juga kemampuan menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifatnya kualitatif. Evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dikuasai siswa, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut terutama menyangkut perkembangan masyarakat dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

Merujuk pada komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial di atas, penulis berpendapat bahwa komponen-komponen ini dapat dilaksanakan pada pengembangan kurikulum muatan lokal di Indonesia. Baik dilihat dari tujuan dan isi kurikulumnya, dimana muatan lokal bertujuan agar peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya, serta mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan

sumber daya alam, kualitas sosial dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional, maupu pembangunan lokal, sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya lingkungannya. Isi kurikulum muatan lokal diambil dari beberapa rumpun pelajaran yang berfungsi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Ada tiga rumpun dalam mata pelajaran muatan lokal, yaitu; rumpun budaya, rumpun keterampilan dan rumpun pendidikan lingkungan. Komponen metode dan evaluasi dalam rekonstruksi sosial juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal, yang perpedoman pada kurikulum rekonstruksi sosial, setiap wilayah, setiap sekolah mempunyai kebebasan untuk menentukan bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa. Seperti dikemukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata (1988: 219, 1977: 201)) sebagai berikut :

“Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah atau sekolah-sekolah tersebut. Dengan demikian, kurikulum terutama isinya sangat beragam, tiap sekolah atau wilayah mempunyai kurikulum tersendiri, tetapi kurikulum ini cukup realistis”.

Dalam pelaksanaan pengajaran muatan lokal di Indonesia yang mengacu pada konsep kurikulum rekonstruksi sosial, tetap harus memperhatikan faktor-faktyor dalam penyusunan kurikulum secara umum, seperti dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (1988), yaitu :

1. Tujuan pendidikan nasional yang menjadi arah pembangunan bangsa, yang menjelaskan tentang seperti apa manusia akan dibentuk.
2. Peserta didik yang akan menjadi sasaran pendidikan, yang akan mempelajari materi tersebut sampai menjadi miliknya.
3. Waktu yang dialokasikan untuk mata pelejaran tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam struktur program kurikulum.
4. Hasil yang diharapkan diperoleh oleh siswa dalam wujud kemampuan kognitif, apektif dan psikomotor.

5. Pemakai lulusan dari suatu jenjang dan jenis pendidikan yang akan menggunakan tenaga kerja.
6. dapat membantu terlaksananya kurikulum tersebut disuatu lembaga pendidikan tempat kurikulum diimplementasikan.

Dalam pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial, sekolah harus berusaha melengkapi sarana penunjang yang tersedia yang memberikan pengetahuan kepada peserta didik, agar nantinya ia bisa menangani hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat. Nana Syaodih Sukmadinata (2000 : 95) mengemukakan : “Sekolah berusaha memberikan penerangan dan melatih kemampuan untuk melihat dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Sejalan dengan pendapat di atas Harold G. Shane dalam Nana Syaodih Sukmadinata (2000 : 95), mengemukakan bahwa : “Para pengembang kurikulum agar mempelajari kecenderungan (trends) perkembangan. Kecenderungan utama adalah perkembangan teknologi dengan berbagai dampaknya terhadap kondisi dan perkembangan masyarakat. Kecenderungan lain adalah perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya”.

.Keyakinan yang dipegang oleh rekonstruksi sosial, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membangun dunia atau masalah-masalah sosial yang lebih baik. Nampaknya keyakinan rekonstruksi sosial ini sejalan dengan tujuan pengembangan muatan lokal di Indonesia.

Walaupun pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Indonesia dirasakan sangat cocok bila menerapkan konsep kurikulum rekonstruksi sosial, bukan berarti akan lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan di negara kita, diantaranya adalah ; (a). Kesiapan pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan pendidikan (dinas pendidikan di daerah), (b).Kesiapan guru di sekolah sebagai pelaksana kurikulum, (c). Kesiapan orang tua dan masyarakat sebagai mitra sekolah, sebagai pelaksana dan pengevaluasi kurikulum, (d). Sarana dan prasarana yang tersedia nampaknya belum sepenuhnya dapat mendukung kebutuhan pendidikan, dan masih banyak lagi yang dapat menghambat pelaksanaan pendidikan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah merupakan bab terakhir dari makalah tentang Konsep kurikulum rekonstruksi sosial dalam pengembangan program muatan lokal di Indonesia. Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, serta saran-saran yang penulis ajukan. Kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Kurikulum rekonstruksi sosial memusatkan pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional, dimana melalui interaksi dan kerja sama ini siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan manusia. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak.
2. Kurikulum muatan lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum nasional, keberadaannya lebih diutamakan agar penyelenggaraan pendidikan di daerah lebih meningkat relevansinya dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya, yang ditujukan terutama agar peserta didik mencintai lingkungannya. Hal tersebut sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, oleh karena itu keberadaan kurikulum muatan lokal harus mendukung pelaksanaan kurikulum nasional.
3. Dalam meningkatkan relevansi pendidikan dengan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah mengupayakan diantaranya dengan pengembangan kurikulum muatan lokal, atau dengan kebijakannya "Link and Match". Melalui kebijakan ini perlu diperkuat keterkaitan antara pendidikan dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, penelitian dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Konsep kurikulum rekonstruksi sosial sangat tepat bila diterapkan dalam program pengembangan muatan lokal di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada :
 - a. Tujuan dan isi kurikulum; berorientasi kepada permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sekitar tempat pendidikan itu dilaksanakan, selalu mengevaluasi rencana-rencana dengan kriteria pemenuhan kebutuhan orang pada umumnya.
 - b. Metode; dalam proses belajar mengajar harus mencari keselarasan antara tujuan-tujuan, materi dan minat siswa, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan lingkungan sosial.
 - c. Evaluasi; pelaksanaan evaluasi tidak hanya penguasaan materi oleh siswa, tetapi menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat, serta pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat dan taraf kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam makalah ini penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Departemen Pendidikan Nasional atau lembaga pengembangan kurikulum, mengingat dalam implementasi pengembangan kurikulum muatan lokal masih jauh dari yang diharapkan, disarankan agar senantiasa melakukan pemantauan ke lapangan untuk melihat secara langsung pembelajaran muatan lokal.
2. Kepada para pengembang kurikulum, penulis menyarankan agar konsep rekonstruksi sosial dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Indonesia, dengan alasan konsep rekonstruksi sosial ini sangat cocok diberikan kepada peserta didik yang nantinya diharapkan dapat merubah sosial masyarakat yang saat ini sedang mengalami krisis di segala bidang.
3. Bagi para orang tua dan masyarakat, diharapkan selalu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pendidikan, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Peningkatan partisipasi ini bisa dilakukan antara lain memberitahukan program-program yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat, kepada pihak sekolah untuk dipelajari dan disesuaikan dengan kurikulum sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1993), Link And Match, Jakarta, Ser Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- , (1994), Kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Doll, Ronald C., (1974), Curriculum Improvement; Decision Making and Process. Third Edition. Allyn and Bacon Inc., Boston-London-Sidney.
- Finch, Curtis R. and Crunkilton, John R., (1979), Curriculum Development in Vocational and Technical Education. Allyn and Bacon, Inc. Boston.
- Garis Besar Haluan Negara, (1993), TAP No. II / MPR / 1993, Bandung, Pustaka Setia.
- Kelly, A. V., (1977), The Curriculum, Teori and Prsctice, London, Hsrver and Row Publisher.
- Kleong Klede Jaya, (1990), Peraturan Pemerintah RI No. 27, 28, 29 & 30 Tahun 1990, Tentang Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Nana Syaodih Sukmadinata, (1988), Prinsip Dan Landasan Pengembangan Kurikulum, Jakarta, Depdikbud, P2LPTK.
- , (2000), Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Nasution, S., (2001), Asas – Asas Kurikulum, Jakarta, Bumi Aksara
- Oliva, Peter F., (1992), Developing The Curriculum, Third Edition, Ali Right Reserved,
Printed in the United States Of Amerika, Harper Collins Publisher
- Suharsimi Arikunto dan Asnah Said, (1998), Pengembangan Program Muatan Lokal (PPML), Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Peningkatan Mutu Guru Kelas Setara D-II.
- Tyler, R. W., (1996), Basic Principles Of Curriculum and Instruction, Chicago, The University of Chicago Press.
- Zais, Robert S., (1976), Curriculum Principles and Foundation. New York, Harper & Row Publisher.